



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2022-2023
KE PROVINSI SULAWESI UTARA**

*

*

**

**

*

*

JAKARTA 2022



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2022-2023
KE PROVINSI SULAWESI UTARA
9-13 OKTOBER 2022

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:
 - a) Pasal 59 ayat (4) butir d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.
 - b) Pasal 59 ayat (5) butir f: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 23 Juni 2022.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 18 Agustus 2022.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Sulawesi Utara adalah untuk:

1. Mendengarkan penjelasan, berdialog, dan mendapatkan masukan langsung dari Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat, serta *stakeholder* di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan,

- serta kelautan dan perikanan, sehubungan dengan fungsi pengawasan Komisi IV DPR RI di Provinsi Sulawesi Utara;
2. Melihat langsung di lapangan manfaat dari realisasi dan pelaksanaan pembangunan bidang kerja Komisi IV DPR RI di Provinsi Sulawesi Utara; serta
 3. Menyerap aspirasi daerah dalam rangka meningkatkan program-program Pemerintah terkait bidang kerja Komisi IV DPR RI pada tahun anggaran yang akan datang.

C. RUANG LINGKUP

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi IV, yaitu Bidang Pertanian, Pangan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kelautan dan Perikanan.

D. SUSUNAN TIM

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022- 2023 ke Provinsi Sulawesi Utara dipimpin oleh Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI) dan diikuti oleh para Anggota Komisi IV DPR RI.

E. PELAKSANAAN KUNJUNGAN

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan pada tanggal 9 s.d 13 Oktober 2022, bertempat di Kota Manado dan Kota Tomohon.

F. LOKASI KUNJUNGAN KERJA

1. Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado;
2. Taman Nasional Bunaken;
3. Pusat Budi Daya Tanaman Hias (Tomohon Show Window), Kota Tomohon;
4. Unit Pengolahan Ikan “UD Trikora” Kota Manado; dan
5. Balai Penelitian Tanaman Palma (Balit Palma) Kabupaten Minahasa Utara.

II. GAMBARAN UMUM

Sulawesi Utara (disingkat Sulut) adalah salah satu provinsi yang terletak di ujung utara Pulau Sulawesi dengan ibu kota terletak di Kota Manado. Sulawesi Utara (Sulut) berbatasan dengan Laut Maluku dan Samudera Pasifik di sebelah timur, Laut Maluku dan Teluk Tomini di sebelah selatan, Laut Sulawesi dan provinsi Gorontalo di sebelah barat, dan provinsi Davao del Sur (Filipina) di sebelah utara. Penduduk Sulawesi Utara pada tahun 2020 berjumlah 2.621.923 jiwa, dan luas wilayahnya adalah 13.892,47 km². Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2010 sebanyak kurang lebih 2.270.596 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,28 persen/tahun. Hampir 45% penduduk tinggal di perkotaan, dan sisanya sebesar 55% tinggal di pedesaan. Angka partisipasi sekolah untuk tingkat sekolah dasar lumayan tinggi sebesar 96,10% sehingga penduduk yg tidak menikmati bangku sekolah dasar hanya kurang dari 5%. Sulawesi Utara memiliki kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 287 pulau dengan 59 di antaranya berpenghuni. Wilayah administratif Sulawesi Utara terbagi menjadi 4 kota dan 11 kabupaten dengan 1.664 desa/kelurahan. Sulawesi Utara terbagi menjadi dua zona yaitu zona selatan yang berupa dataran rendah dan dataran tinggi serta zona utara yang meliputi kepulauan.

Zona ekonomi eksklusif Sulawesi Utara mencapai 190.000 km² dengan pesisir pantai sepanjang 2.395,99 km dan luas hutan mencapai 701.885 hektare. Wilayah Sulawesi Utara juga memiliki banyak gunung berapi. Sulawesi Utara terletak di jazirah utara Pulau Sulawesi atau tepatnya 0°LU – 3°LU dan 123°BT – 126°BT serta merupakan salah satu daerah yang terletak di sebelah utara garis khatulistiwa. Sulawesi Utara terdapat 41 buah gunung dengan ketinggian berkisar antara 1.112 - 1.995 dpl. Kondisi geologi sebagian besar adalah wilayah vulkanik muda, sejumlah besar erupsi serta bentuk kerucut gunung merapi aktif yang padam menghiasi Minahasa bagian tengah, daerah Bolang Mongondow dan kepulauan Sangihe. Material-material yang dihasilkan letusannya berbentuk padat serta lain-lain bahan vulkanik lepas. Semua vulkanik ini berbentuk pegunungan (otogenisa) menghasilkan morfologi yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung dengan

perbedaan relief topografik yang cukup besar. Sulawesi Utara terdapat 5 wilayah yang di kelilingi oleh gunung api aktif yaitu:

1. Kabupaten Bolang Mongondow:
 - a. Gunung Ambang dengan ketinggian 1.689 dpl
2. Kabupaten Minahasa Selatan:
 - a. Gunung Soputan dengan ketinggian 1.783 dpl
3. Kota Tomohon:
 - a. Gunung Lokon dengan ketinggian 1.579,6 dpl
 - b. Gunung Mahawu dengan ketinggian 1.331,0 m yang merupakan hulu dari 12 sungai besar dengan 7 danau.
4. Kepulauan Sangihe:
 - a. Karangetang dengan ketinggian 1.320,0 dpl
 - b. Ruang dengan ketinggian 714,0 dpl
 - c. Banuawuhu
 - d. Submarin
 - e. Gunung Awu.
5. Kota Bitung:
 - a. Gunung Tangkoko dengan ketinggian 1.149,0 dpl

A. Gambaran Umum Kota Tomohon

Kota Tomohon adalah salah satu kota yang ada di provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Sebelum tahun 2003, Tomohon merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Minahasa. Dalam perkembangannya, Tomohon mengalami kemajuan, sehingga ada aspirasi dari warga Tomohon untuk meningkatkan status Tomohon menjadi sebuah kota. Tomohon menjadi daerah otonom (kota) dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara oleh DPR RI, tetapi peresmiannya baru pada tanggal 4 Agustus 2003. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kota Tomohon tahun 2021, jumlah penduduk kota Tomohon tahun 2020 berjumlah 100.587 jiwa, dengan kepadatan 683 jiwa/km².

B. Batas Wilayah

Kota Tomohon memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

| | |
|---------|---|
| Utara | Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa |
| Timur | Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa |
| Selatan | Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa |
| Barat | Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa |

Tomohon dikenal sebagai sentra produksi bahan makanan sayur-sayuran, kini predikat itu telah beralih ke Kecamatan Modinding, Kabupaten Minahasa Selatan. Tomohon kini dikenal sebagai produsen bunga (kembang) dan sentra industri Rumah Kayu yang terletak di Desa Woloan . Tidak hanya itu, letaknya yang diapit oleh tiga gunung aktif, yaitu: Lokon, Mahawu dan Masarang menjadikan wilayah ini sebagai daerah yang subur dan sebagai daerah wisata karena hawanya yang sejuk.

C. Profil Komoditas Florikultura Di Kota Tomohon

Kota Tomohon berada di dataran tinggi menjadikan kota Tomohon sebagai salah satu sentra hortikultura di Provinsi Sulawesi Utara khususnya untuk komoditas florikultura atau tanaman hias dataran tinggi seperti tanaman hias Bunga (Krisan, Mawar, Aster, Gladiol, Pikok, Anthurium dan lain-lain) serta tanaman hias dalam pot. Berdasarkan data BPS tahun 2021, produksi beberapa komoditas tanaman hias di Kota Tomohon merupakan yang tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara. Data produksi beberapa komoditas florikultura di Kota Tomohon dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. Data Produksi Komoditas Florikultura di Kota Tomohon Tahun 2020-2021

| No | Nama | Satuan | 2020 | 2021 |
|----|-------------------|---------|-----------|-----------|
| 1 | Aglaonema | Pohon | 1.750 | 26.050 |
| 2 | Dracaena | Pohon | 620 | 3.875 |
| 3 | Euphorbia | Pohon | 200 | - |
| 4 | Gerbera (Herbras) | Tangkai | 8.858 | 14.673 |
| 5 | Gladiol | Tangkai | 28.500 | - |
| 6 | Heliconia | Pohon | 3.750 | 3.750 |
| 7 | Ixora (Soka) | Pohon | 1.400 | 5.400 |
| 8 | Krisan | Tangkai | 4.200.000 | 4.375.000 |
| 9 | Mawar | Tangkai | 30.000 | 28.210 |
| 10 | Palem | Pohon | 75 | 95 |
| 11 | Phylodendron | Pohon | 115 | 15 |
| 12 | Puring | Pohon | - | 150 |
| 13 | Sedap Malam | Tangkai | 1.125 | 900 |

Sumber: BPS 2022, Diunduh melalui aplikasi Sipedas

Potensi tanaman hias di Kota Tomohon tersebar di beberapa kecamatan seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel. Data Potensi Florikultura di Kota Tomohon

| No | Kecamatan | Potensi (Ha) |
|-------|-----------------|--------------|
| 1 | Tomohon Barat | 10 |
| 2 | Tomohon Utara | 100 |
| 3 | Tomohon Selatan | 25 |
| 4 | Tomohon Timur | 10 |
| 5 | Tomohon Tengah | 30 |
| Total | | 175 |

Sumber: Dinas Pertanian Kota Tomohon

Berdasarkan data Dinas Pertanian Kota Tomohon bahwa sumber daya, infrastruktur dan kelembagaan yang dimiliki Kota Tomohon mendukung potensi pengembangan florikultura meliputi:

1. Luas lahan pengembangan : 175 ha
2. Jumlah kelompok tani : 47 kelompok tani
3. Luasan *screen house* : 27.696 m²
4. Jumlah *screen house* : 135 unit

5. UPTD balai perbenihan : 1 unit (3,5 ha)
6. Laboratorium kultur jaringan : 1 unit
7. Kios outlet / florist : 20 unit

D. Potensi Krisan di Kota Tomohon

Berdasarkan informasi pada Tabel 1, diketahui bahwa krisan merupakan komoditas tanaman hias terbesar yang berkembang di Kota Tomohon. Produksi krisan dihasilkan hanya pada 1 (satu) kecamatan yaitu Kecamatan Tomohon Utara, tepatnya di Kelurahan Kakaskasen, Kakaskasen I dan Kakaskasen II. Data luas panen produksi dan produktivitas krisan di Kota Tomohon tahun 2019-2021 dapat dilihat sebagai berikut (*Sumber: BPS 2022, Diunduh melalui aplikasi Sipedas*):

| | Tahun Luas Panen | | |
|-------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|
| (m2) | Produksi | (Tangkai) | Produktivitas (Tangkai/m2) |
| 2019 | 72.000 | 5.485.000 | 76 |
| 2020 | 54.500 | 4.200.000 | 77 |
| 2021 | 55.000 | 4.475.000 | 81 |

Balitbangtan melalui Balai Penelitian Tanaman Hias mendukung terwujudnya Kota Tomohon sebagai Kota Bunga dengan mengintroduksikan inovasi florikultura dan secara konsisten, melalui pendampingan dan bimbingan teknis yang intensif kepada masyarakat sebagai pelaku usaha melalui berbagai program. Introduksi varietas unggul baru, dan teknologi pendukungnya seperti teknologi fotoperiodisitas dengan sistem siklik untuk menghemat energi listrik, teknologi pemupukan, teknologi penyiraman, teknologi zat pengatur tumbuh, teknologi pinching, serta teknologi pengendalian hama dan penyakit.

Teknologi tersebut diintroduksikan kepada para pelaku usaha melalui berbagai metode, di antaranya melalui pembuatan demplot dan demarea bekerjasama dengan BPTP Sulawesi Utara dan Dinas Pertanian dan

Peternakan Kota Tomohon mulai tahun 2007. Inovasi teknologi juga dikembangkan melalui BIMTEK bekerjasama dengan Direktorat Buah dan Florikultura maupun instansi Pemerintah lainnya.

Kerja sama perakitan varietas local dilakukan, dan menghasilkan dua varietas unggul baru yaitu varietas Kulo dan Ririh pada tahun 2012 melalui SK Mentan No. 2775/Kpts/SR.120/8/2012 dan No. 2776/Kpts/SR.120/8/2012.

Melalui program RIPK tahun 2020, juga telah dilakukan pendampingan penerapan teknologi budidaya berbasis ekspor dan teknologi kultur jaringan untuk menjamin kualitas dan kuantitas benih, sehingga terwujud kemandirian benih. Melalui program yang sama, juga telah dibentuk rancangan ekspor bunga potong ke Jepang tahun 2024 yang berkesinambungan dengan dibentuknya kelompok-kelompok tani di bawah satu champion sebagai motor penggerak program ekspor tersebut. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak terkait seperti Karantina, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Pariwisata, dalam satu kegiatan FGD di akhir tahun 2020.

Tahun 2012 Balithi melepas varietas Kulo yang merupakan krisan varietas local Tomohon. Pendaftaran dinyatakan dalam SK 2776/Kpts/SR.120/8/2012. Selain itu, pada tahun 2021 Balithi bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan BPTP Tomohon melakukan kegiatan pendampingan dengan tajuk Dukungan Inovasi dalam sistem agribisnis krisan berbasis Kawasan dan berorientasi ekspor.

E. Gambaran Umum Kota Manado

Kota Manado atau Menado adalah ibu kota dari provinsi Sulawesi Utara. Kota Manado memiliki 11 kecamatan serta 87 kelurahan dan desa. Manado terletak di Teluk Manado, dan dikelilingi oleh daerah pegunungan. Kota ini memiliki 408.354 penduduk pada Sensus 2010, menjadikannya kota terbesar kedua di Sulawesi setelah Makassar. Jumlah penduduk di Manado diperkirakan (berdasarkan Januari 2014) adalah 430.790 jiwa [5] dan bertambah menjadi 475.557 jiwa pada

tahun 2020, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2020. Kota Manado terletak di ujung jazirah utara pulau Sulawesi, pada posisi geografis 124°40' - 124°50' BT dan 1°30' - 1°40' LU. Iklim di kota ini adalah iklim tropis dengan suhu rata-rata 24° - 27 °C. Curah hujan rata-rata 3.187 mm/tahun dengan iklim terkering di sekitar bulan Agustus dan terbasah pada bulan Januari. Intensitas penyinaran matahari rata-rata 53% dan kelembaban nisbi ±84 %. Luas wilayah daratan adalah 15.726 hektare.

Manado juga merupakan kota pantai yang memiliki garis pantai sepanjang 18,7 kilometer. Kota ini juga dikelilingi oleh perbukitan dan barisan pegunungan. Wilayah daratannya didominasi oleh kawasan berbukit dengan sebagian dataran rendah di daerah pantai. Interval ketinggian dataran antara 0-40% dengan puncak tertinggi di gunung Tumpa. Wilayah perairan Kota Manado meliputi pulau Bunaken, pulau Siladen dan pulau Manado Tua. Pulau Bunaken dan Siladen memiliki topografi yang bergelombang dengan puncak setinggi 200 meter. Sedangkan pulau Manado Tua adalah pulau gunung dengan ketinggian ± 750 meter. Sementara itu perairan teluk Manado memiliki kedalaman 2-5 meter di pesisir pantai sampai 2.000 meter pada garis batas pertemuan pesisir dasar lereng benua. Kedalaman ini menjadi semacam penghalang sehingga sampai saat ini intensitas kerusakan Taman Nasional Bunaken relatif rendah. Jarak dari Manado ke Tondano adalah 28 km, ke Bitung 45 km dan ke Amurang 58 km. Batas wilayah Kota Manado adalah sebagai berikut:

| | |
|---------|--|
| Utara | Kabupaten Minahasa Utara dan Selat Mantehage |
| Timur | Kabupaten Minahasa |
| Selatan | Kabupaten Minahasa |
| Barat | Teluk Manado |

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) nomor 4 tanggal 27 September 2000 tentang perubahan status desa menjadi kelurahan di

kota Manado dan PERDA nomor 5 tanggal 27 September 2000 tentang pemekaran kecamatan dan kelurahan, wilayah kota Manado yang semula terdiri atas 5 kecamatan dengan 68 kelurahan/desa dimekarkan menjadi 9 kecamatan dengan 87 kelurahan. Berdasarkan PERDA Kota Manado Nomor 2 Tahun 2012 kota Manado dimekarkan kembali menjadi 11 kecamatan dengan 87 kelurahan. Tabel di bawah ini adalah daftar kecamatan beserta luas dan jumlah kelurahannya, yaitu:

| No. | Kecamatan | Luas wilayah (km ²) | Jumlah kelurahan |
|-----|-------------------|------------------------------------|---------------------|
| 1. | Bunaken | 36,19 | 5 |
| 2. | Bunaken Kepulauan | 16,85 | 4 |
| 3. | Malalayang | 17,12 | 9 |
| 4. | Paal Dua | 8,02 | 7 |
| 5. | Mapanget | 49,75 | 10 |
| 6. | Sario | 1,75 | 7 |
| 7. | Singkil | 4,68 | 9 |
| 8. | Tikala | 7,10 | 5 |
| 9. | Tuminting | 4,31 | 10 |
| 10. | Wanea | 7,85 | 9 |
| 11. | Wenang | 3,64 | 12 |

Perekonomian Kota Manado khususnya terdiri dari sektor perdagangan, perhotelan dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa. Pada tahun 1996 peran ketiga sektor utama ini dalam pembentukan PDRB adalah sejumlah 68,74%. Dalam kurun waktu 5 tahun, peran ketiga sektor ini cenderung semakin dominan yang dilihat dari kontribusinya pada tahun 2000 yang meningkat menjadi 74,68%.

III. HASIL KUNJUNGAN

A. Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado

Pada saat pertemuan disampaikan beberapa capaian dan kinerja operasional Balai Karantina Pertanian Manado (BKP Manado). BKP Manado memiliki tanggung jawab yang besar dalam rangka mencegah masuk, tersebar dan penularan HPHK, HPTK, dan OPTK yang terbawa oleh Media Pembawa; selain itu juga memiliki tugas dan fungsi tambahan, yaitu mendukung ekspor dengan menjamin komoditas pertanian ekspor tidak mengandung cemaran/kontaminan sehingga dapat diterima oleh negara lain. Terlebih lagi BKP Wilker Bitung yang merupakan pelabuhan laut yang menjadi pintu masuk dan keluar serta penghubung/hub bagi wilayah lain. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain mengenai anggaran, SDM dan sarana prasarana.

Hal-hal lain yang perlu ditingkatkan kinerjanya antara lain kemudahan layanan publik, pendampingan pemenuhan persyaratan ekspor produk pertanian guna mendorong ekspor pertanian sulut; memfasilitasi konsultasi persyaratan ekspor dan pendampingan pemenuhan persyaratan ekspor produk pertanian, melalui layanan dan pendampingan bagi calon eksportir terkait syarat dan protocol karantina dinegara tujuan ekspor, serta bimtek maupun pelatihan protocol karantina negara tujuan. Selain itu peningkatan sarana dan prasarana karantina, seperti penguatan dan penambahan laboratorium uji menjadi hal penting yang harus dilakukan.

Selain itu, perlu didorong penguatan perkarantinaan di perbatasan dan penguatan fungsi karantina di Kab Kepulauan Sangihe dan Kab Kep Talaud. Berdasarkan beberapa hal tersebut, harus didorong peningkatan dan pengembangan sarana pendukung karantina di perbatasan (instalasi karantina, mini laboratorium, kendaraan operasional, penambahan incenerator (terutama dibitung, mengingat jauhnya jarak dengan manado), perlunya fasilitas instalasi karantina hewan yang representatif mengingat banyaknya penahanan hewan hidup di BKP manado.

Pada saat kunjungan, tim Komisi IV DPR RI sangat mengapresiasi Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado atas terobosannya dengan membangun dashboard digital satu data pertanian SULAWESI Utara (MINAESA) yang terlengkap dengan biaya yang relative rendah. Komisi IV DPR RI juga meminta agar hal ini menjadi contoh/pilot project bagi satker lain, dan juga meminta agar selalu memperbaharui dan melengkapi data terkait pertanian dari hulu hingga hilir.

B. Taman Nasional Bunaken

Taman Nasional Bunaken merupakan kawasan pelestarian ekosistem tropis perairan yang berada di pusat segitiga terumbu karang dunia. Lokasi kawasan Taman Nasional Bunaken berada di Provinsi Sulawesi Utara dengan Kota Manado sebagai kota terdekat. Taman Nasional Bunaken didirikan pada tahun 1991 dan memiliki luas kawasan mencapai 89.065 hektare. Dari luas tersebut, sebanyak 97 persen di antaranya merupakan habitat laut, sedangkan 3 persen sisanya daratan. Taman Nasional Bunaken mencakup lima pulau, yaitu Pulau Bunaken, Pulau Manado Tua, Pulau Mantehage, Pulau Naen, dan Pulau Siladen.

Bunaken pertama kali ditetapkan sebagai kawasan konservasi dan wisata bawah laut, pada 29 Desember tahun 1980. Gubernur Sulawesi Utara mengeluarkan Surat Keputusan nomor 224 tahun 1980 tentang obyek wisata laut Manado. Isi keputusan ini mencakup Pulau Bunaken dan sekitarnya. Gubernur Sulawesi Utara memperluas kawasan konservasi pada 1984. Lokasi ini meliputi perairan Arakan dan Wawontulap yang berada di pesisir Sulawesi (bagian selatan) melalui SK nomor 201 tahun 1984.

Peneliti IUCN/WWF Rodney V Salm dan Graham F Usher juga telah melakukan survei di kawasan Bunaken. Penelitian tersebut menyangkut rencana pengelolaan zonasi taman laut Bunaken yang diajukan untuk Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA). Hasil ini bisa dilihat dalam Report IUCN/WWF no. project 3108, Marine Conservation, Bogor, February 1984. Pada Juli 1984, Rodney V Salm

(IUCN/WWF) dan Matheus Halim (Sub Direktorat Konservasi Lautan, PHPA) mengajukan data atlas kawasan konservasi laut di seluruh Indonesia. Laporan ini dapat dilihat dalam Marine Conservation Data Atlas. Dalam data atlas tersebut, di nomor 143 menyebutkan bahwa Pulau Bunaken dan sekitarnya berstatus sebagai taman wisata laut. Keterangan pada nomor 144, Arakan sebagai suaka margasatwa. Di perairan kawasan Arakan dan Wawontulap ini sebagai habitat mamalia laut yang dilindungi, seperti Dugong dugon (duyung).

Pada 1986, kawasan perairan Arakan – Wawontulap, Bunaken dan sekitarnya dijadikan kawasan Cagar Alam Laut. Menteri Kehutanan mengeluarkan SK nomor 328/Kpts-II/1986 untuk Arakan – Wawontulap dan Bunaken. Status cagar alam laut ini sangat ketat. Kegiatan yang dapat dilakukan di lokasi itu hanya penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan serta kegiatan yang menunjang budidaya. Selang tiga tahun, pada 1989, SK Cagar Alam Laut diralat. Kawasan Bunaken dan sekitarnya diusulkan sebagai calon taman nasional. Pada 15 Oktober 1991, Menteri Kehutanan menetapkan Pulau Bunaken dan sekitarnya, serta Arakan Wawontulap sebagai taman nasional melalui SK bernomor 730/Kpts-II/91. Sedangkan peresmian Taman Nasional Bunaken dilakukan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 24 Desember 1992 di Bongohulawa.

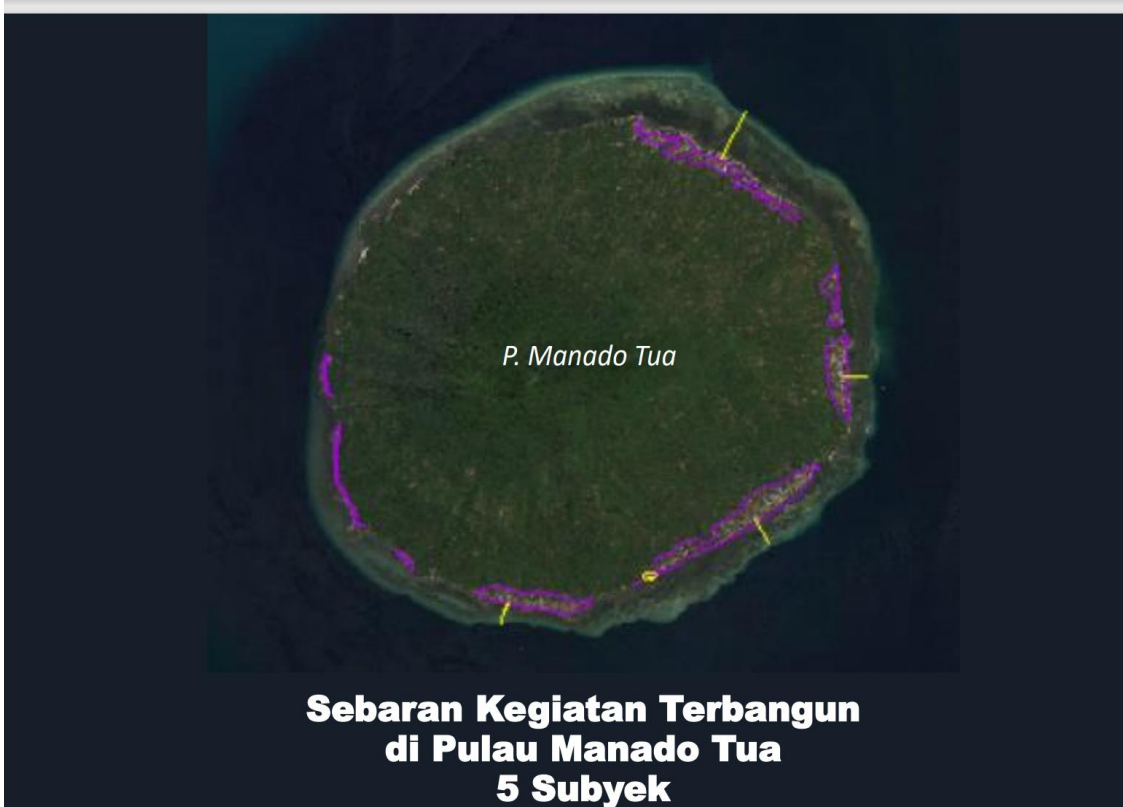
Fungsi pokok Taman Nasional Bunaken antara lain memberikan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa. Selain itu juga berfungsi sebagai pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Di kawasan Taman Nasional Bunaken terdapat sekitar 22 desa yang dihuni sekitar 35.000 orang penduduk yang menggantungkan ekonominya dari wisata bahari dan penangkapan ikan. Kawasan Taman Nasional Bunaken ini sangat cocok bagi pecinta diving dan snorkeling. Sehingga bertumbuhan banyak tempat penginapan dan resort di dalam kawasan Taman Nasional Bunaken. Ketidak sesuaian kepemilikan hak milik tanah di dalam Taman Nasional Bunaken akan di selesaikan secara bertahap

dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan identifikasi jenis dan kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam kawasan Taman Nasional Bunaken, (seperti di peta).







KONDISI KEGIATAN TERBANGUN

berdasarkan SK.531/2021 di kawasan TN Bunaken



Sebagian besar subyek hukum (swasta dan perorangan) sedang tidak beroperasi akibat dampak pandemi Covid-19.



Subyek beberapa diantaranya merupakan warga asing (Itali, Tiongkok, dsb).

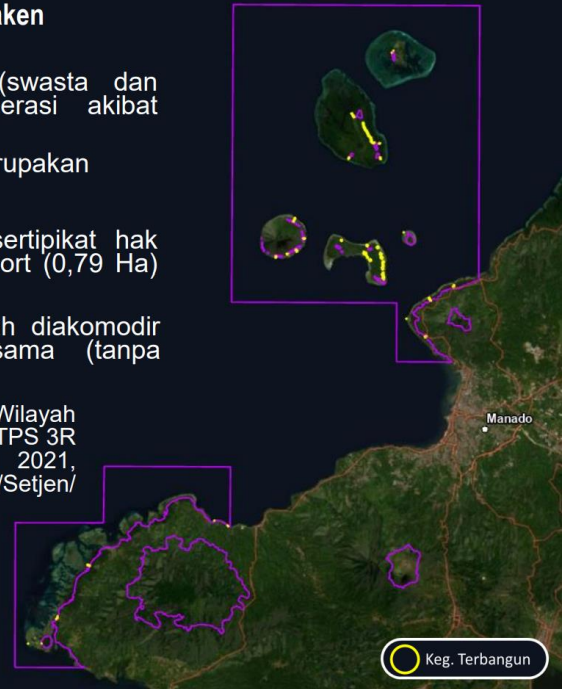


Sebagian besar subyek memiliki sertifikat hak milik (SHM), al. Raja Laut Dive Resort (0,79 Ha) dan Cakalang Dive Resort (0,11 Ha).



Terdapat 2 subyek/obyek yang telah diakomodir melalui skema perjanjian Kerjasama (tanpa clearance), yaitu:

- Balai Pemukiman dan Prasarana Wilayah Sulawesi Utara dengan obyek berupa TPS 3R seluas 0,03 Ha (PKS bulan Juli 2021, sebelum terbitnya SK.531/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2021).
- Dinas PUPR Kabupaten Minahasa Utara dengan obyek berupa jalan seluas 1,62 ha atau sepanjang 2,7 km lebar 6 m (PKS tanggal 25 Januari 2022).



Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Taman Nasional Bunaken di dampingi oleh Plt Dirjen KSDAE dan Dirjen Gakkum yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian kegiatan usaha yang terbangun dalam kawasan hutan. Agenda kunjungan kerja di Taman Nasional Bunaken diawali dengan kegiatan pelepasliaran tukik yang berasal dari kegiatan penangkaran Penyu yang di kelola Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara. Selanjutnya rombongan kunjungan kerja bersama mitra pendamping melakukan kunjungan lapangan ke beberapa lokasi usaha atau kegiatan yang terbangun dalam kawasan hutan tanda izin. Lokasi pertama adalah fasilitas SPAM yang di bangun oleh Kementerian PUPR untuk mensuplai air bersih di Pulau Bunaken. Fasilitas ini di bangun tanpa kerjasama dengan Balai Taman Nasional Bunaken, sehingga untuk penyelesaiannya menurut Plt Dirjen KSDAE akan di buat perjanjian penguatan fungsi konservasi. Selanjutnya rombongan berjalan mengelilingi Pulau Bunaken dan melihat beberapa resort yang sudah terbangun di dalam kawasan konservasi namun tidak berizin antara lain Raja Laut Diver Resort dan 3 Will Dive Resort. Rombongan kunjungan

kerja juga menyempatkan berdiskusi dengan salah satu pemilik resort yaitu Raja Laut *Dive Resort* yang merupakan warga negara Italia. Pemilik resort memberikan beberapa masukan dalam pengelolaan Taman Nasional Bunaken antara lain kontrol bagi tamu dan wisatawan yang masuk ke dalam taman nasional. Selanjutnya perilaku beberapa wisatawan yang merusak terumbu karang serta kegiatan menombak ikan yang akan mengancam kelestarian populasi ikan di taman nasional. Terakhir hal yang di sampaikan adalah serbuan sampah-sampah plastik yang berasal dari Kota Manado dan sekitarnya sudah dalam taraf mengganggu penyelam dan kebersihan laut di Taman Nasional Bunaken.

Selama kunjungan lapangan, Komisi IV DPR RI juga menyoroti pengelolaan sampah di Pulau Bunaken serta penanganan air limbah dari resort resort dan pemukiman warga sehingga tahun 2023 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar membangun IPAL Komunal di Pulau Bunaken.

Setelah melakukan kunjungan lapangan, Komisi IV DPR RI dan para mitra melakukan dialog dengan warga, perwakilan pemilik resort, OPD dan forkompinda di Pulau Bunaken. Ketua Komisi IV DPR RI dalam arahan pembuka diskusi menyampaikan beberapa hal:

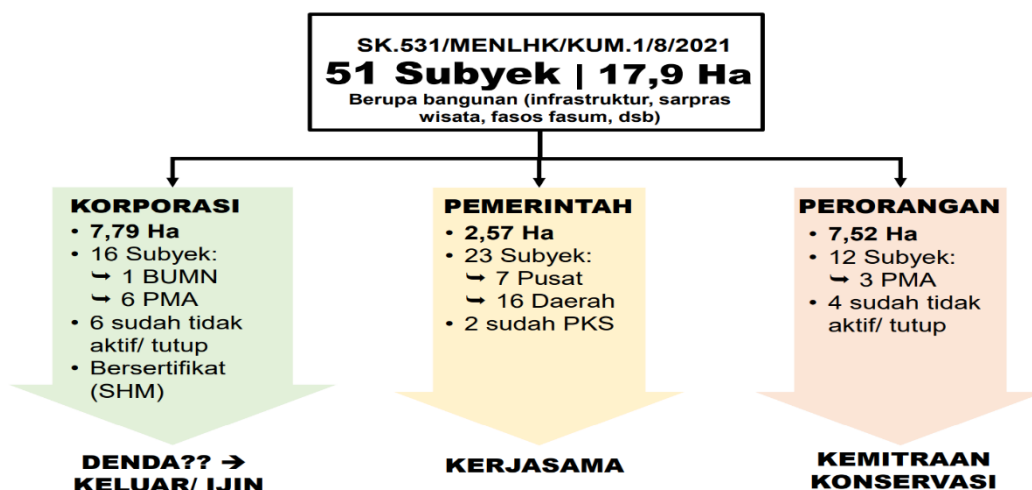
1. Saat ini sedang dalam masa recovery pasca pandemi Covid 19 sehingga sektor pariwisata di Pulau Bunaken perlu di dukung oleh semua pihak termasuk masalah kepastian hukum dan kepastian perizinan yang di miliki oleh investor. Ketidak pastian perizinan akan mengancam industri pariwisata yang sedang tumbuh dan akan mengancam kelestarian terumbu karang di Pulau Bunaken.
2. Untuk mendorong percepatan penyelesaian perizinan Komisi IV DPR RI akan melakukan rapat kerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencari solusi yang adil atau *win-win solution* agar negara tidak di rugikan, rakyat juga tidak di rugikan serta tidak ada peraturan perundang-undangan yang di langgar.
3. Perlu kesadaran dari pengelola wisatawan, wisatawan yang hadir serta warga untuk melestarikan alam di Taman Nasional Bunaken

termasuk di dalamnya kesadaran dalam mengelola sampah dan air limbah dari resort dan warga. Tahun 2023 harus di bangun IPAL Komunal di Taman Nasional Bunaken.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang di wakili oleh Plt Dirjen KSDAE dan Dirjen Gakkum menyampaikan bahwa “Sesuai dengan PP 24/2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk diberikan akses legal atas kegiatan-kegiatan yang telah terbangun di kawasan TN Bunaken ini yang belum memperoleh izin, dengan pendekatan pemberian akses legal di kawasan konservasi berupa Kemitraan Konservasi. Untuk kegiatan-kegiatan yang dikelola pemerintah yang belum mendapatkan perizinan, akan dilakukan dengan pendekatan kerja sama dengan taman nasional. Sementara untuk dunia usaha/pihak swasta bisnis yang melakukan kegiatan di zonasi pemanfaatan sedianya untuk mengurus Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam. Diharapkan jika sudah memperoleh akses legal, dukungan bantuan baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi akan mudah, sehingga bisa mengangkat dan mendongkrak perekonomian masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Bunaken.

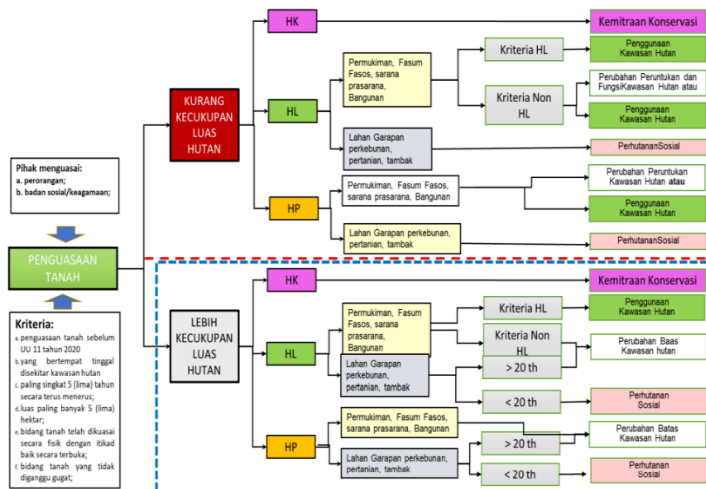
Perwakilan warga dan pemilik resort menyampaikan permasalahan tentang status kepemilikan lahan yang di kuasai yang sudah memiliki sertifikat hak milik serta kepastian usaha dan rencana apabila akan diperjualbelikan.

PEMBAGIAN KLUSTER PENYELESAIAN



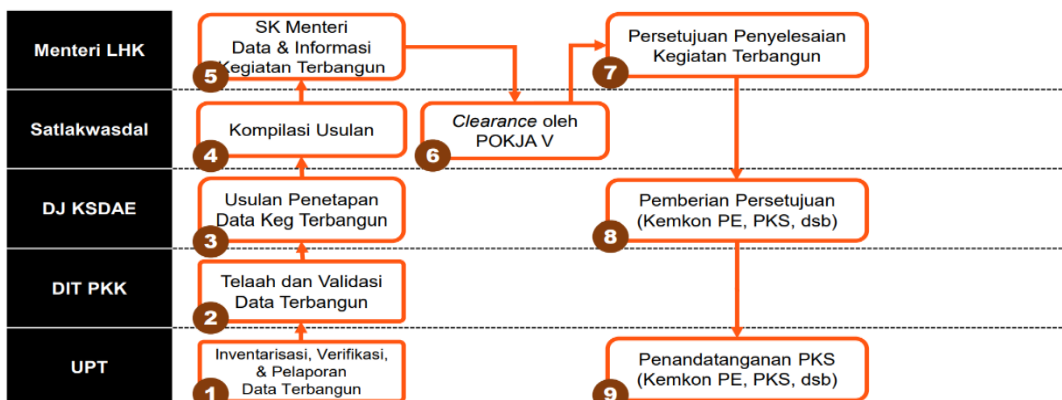
POSISI KEMITRAAN KONSERVASI

dalam Pola-Pola Penyelesaian Kegiatan Terbangun (Kebun Masyarakat) di Kawasan Hutan sesuai PP 23 dan PP 24 Tahun 2021



- Masyarakat yang memenuhi persyaratan **tidak dikenai denda administratif** (≤ 5 ha, > 5 tahun).
- Pelaksanaan kemitraan konservasi perlu mendapatkan persetujuan/ *clearance* dari Menteri LHK dan Satuan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian (Satlakwasdal) Implementasi UU Cipta Kerja Bidang LHK.
- Khusus penyelesaian melalui skema Kemitraan Konservasi, akan diatur juga dalam **Peraturan Menteri LHK** tentang Kemitraan Konservasi, yang saat ini masih dalam proses.

Alur Proses Kemitraan Konservasi Pasca UUCK



C. Pusat Budi Daya Tanaman Hias (Tomohon *Show Window*), Tomohon. Alokasi APBN Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020-2022 di Kota Tomohon.

Pada pertemuan disampaikan bahwa dalam upaya pengembangan komoditas florikultura di Kota Tomohon, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Hortikultura sejak tahun 2012 hingga saat ini telah mengalokasikan anggaran untuk memperkuat pengembangan florikultura, khususnya pengembangan krisan di tomohon, sebagai berikut:

Tabel 4. Fasilitas Bantuan Pengembangan Krisan di Kota Tomohon dari Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2012-2021

| Tahun | Luas Kawasan (m ²) | Jenis Bantuan (Luasan dalam m ²) | |
|---------------|--------------------------------|--|-------------------|
| | | Ekstensifikasi | Intensifikasi |
| | | (<i>Green House</i>) | (Sarana Budidaya) |
| 2012 | 6.500 | <i>Green House</i> dan Sarana Budidaya | |
| 2013 | 5.000 | <i>Green House</i> dan Sarana Budidaya | |
| 2014 | 10.000 | <i>Green House</i> dan Sarana Budidaya | |
| 2015 | 5.000 | <i>Green House</i> dan Sarana Budidaya | |
| 2016 | 10.000 | <i>Green House</i> dan Sarana Budidaya | |
| 2017 | - | - | |
| 2018 | 1.500 | <i>Green House</i> dan Sarana Budidaya | |
| 2019 | 900 | 200 | 700 |
| 2020 | 1.000 | 1.000 | - |
| 2021 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2022 | 2.400 | 400 | 2.000 |
| Jumlah | 44.300 | | |

Selain itu, disampaikan juga peran pemerintah Kota Tomohon dalam rangka mendukung pengembangan florikultura antara lain melalui penyusunan dan penetapan regulasi hukum yang dijadikan acuan dalam implementasi pengembangan usaha florikultura. Beberapa regulasi yang sudah berlaku antara lain:

1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kota Bunga Tomohon;
2. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Usaha Florikultura di Kota Tomohon; dan
3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Festival Bunga Internasional Kota Tomohon.

Lebih lanjut lagi, beberapa dukungan dari stakeholder lain untuk pengembangan florikultura di Kota Tomohon, diantaranya adalah: Pertama, kemitraan dengan BUMN dan Perbankan (Pertamina, BRI, BNI, Bank Sulut GO dan BI). Kedua, membangun kerja sama dengan pemerintah Jepang melalui proyek hibah luar negeri *Agriculture Promotion through Agritourism Utilizing the Knowledge of Roadside Stations "Michino Eki"* antara Kota Tomohon dengan Kota Chiba Minamiboso. Proyek hibah dimaksud bertujuan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga

yang terlibat dalam sektor pertanian dan pariwisata di Kota Tomohon melalui pengembangan kerja sama antar kawasan, dan pemasaran produk pertanian yang dilakukan melalui pembangunan outlet penjualan produk segar, dan olahan di jalan lintas Kota Tomohon dengan memanfaatkan pengetahuan tentang stasiun jalan “*michi no eki*” dari Kota Chiba minamibosho.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya pengembangan florikultura di Tomohon, antara lain sarana produksi/*screen house* yang ada; belum memenuhi kriteria standar ekspor; pemenuhan permintaan volume ekspor 20 ribu tangkai per bulan belum dapat dipenuhi karena keterbatasan jumlah *screen house*; permintaan bunga di pasar domestik masih tinggi sehingga petani lebih cenderung menjual bunga di dalam daerah (lintas wilayah Provinsi Sulawesi Utara); dan prosedur dan pengurusan dokumen ekspor florikultura dirasa petani lebih sulit dibandingkan jika menjual langsung ke konsumen lokal. Pada saat kunjungan, tim Komisi IV DPR RI mendapatkan beberapa masukan dan aspirasi, diantaranya kendala ekspor dimana membutuhkan biaya yang mahal, apalagi belum ada kebijakan subsidi transportasi untuk meningkatkan ekspor, produk yang dihasilkan juga belum standar dan kontinu. Selain itu, dalam rangka memenuhi standar dari *buyer*, dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung seperti *screen house* dan *smart screen house*, dan adanya kesulitan bagi petani untuk mengakses pupuk, terutama untuk petani hortikultura (khususnya petani sayur). Hal lain yang disampaikan juga adalah perlunya dukungan berupa sarana prasarana operasional untuk pusat budi daya tanaman hias di Tomohon (*Tomohon Show Window*), masih tingginya ketergantungan bibit dari luar Tomohon (Pulau Jawa) sehingga biaya produksi menjadi tinggi, bibit yang datang sebagian mati, kendala pembiayaan, dan kendala listrik di beberapa tempat yang belum tersedia secara optimal.

Beberapa tanggapan dari Komisi IV DPR RI diantaranya adalah komoditas yang dikembangkan di Tomohon tidak hanya tanaman hias, namun juga komoditas hortikultura lainnya. Terkait permasalahan pupuk, Komisi IV

DPR RI mendorong kelompok tani untuk menjadi kios/pengecer pupuk. Selain itu, perlunya koordinasi antar stakeholder dan untuk mengatasi kendala bibit. *Show window* harus menyiapkan benih sumber yang kemudian dibagikan kepada penangkar. Selain itu, pihak karantina juga harus mendampingi serta memfasilitasi pelaku usaha/petani untuk dapat menembus pasar ekspor krisan.

D. Unit Pengolahan Ikan “UD Trikora”, Kota Manado

UD. Trikora pertama kali didirikan pada tahun 2000 yang merupakan home industry pertama di Manado yang memproduksi abon ikan cakalang untuk dipasarkan kemasyarakat lokal. Seiring dengan perkembangannya, kini UD. Trikora telah berhasil mengembangkan pemasaran ke tingkat nasional.

Pada awal berdirinya UD. Trikora adalah perusahaan keluarga yang didedikasikan untuk memberdayakan *uneducated women* yang tinggal disekitar pabrik. Kini tenaga kerja utama UD. Trikora masih wanita-wanita ibu rumah tangga yang kurang berpendidikan, tapi telah diberikan training untuk mendapatkan keterampilan yang diperlukan untuk kemajuan perusahaan, terutama tuntutan standar nasional dan internasional dalam hal pengolahan makanan yang sangat ketat dan *high standard*. Sejak pertama kali didirikan hingga saat ini UD. Trikora selalu mengutamakan standar yang tinggi dalam memproduksi produk yang berkualitas bagi masyarakat.

Pengembangan produk dan peningkatan kualitas selalu dilakukan secara konsisten agar tujuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai standar yang telah ditentukan dapat selalu terpenuhi. Hingga saat ini UD. Trikora memiliki berbagai macam produk yaitu: abon cakalang manis, abon cakalang pedas, abon cakalang garing dan abon rica roa. Dengan bantuan pihak-pihak terkait, UD. Trikora berharap tahun ini dapat mengembangkan pemasaran hingga kemasyarakat luar negeri (Internasional).

Produksi olahan ikan di UD. Trikora tercatat pada Tahun 2019 sebanyak 5.800 kg. selanjutnya pada tahun 2020 sebanyak 2.600 kg (turun), dan tahun 2021 sebanyak 3.000 kg dengan target pertahun sebanyak 6.000 kg. Adapun jumlah pekerja proses dan packing terdapat sebanyak 6 Orang, dan bagian *logistic* sebanyak 1 orang. Produk UD. Trikora telah tersertifikasi dan terdaftar, antara lain *Good Manufacturing Practice* (GMP), Sucofindo, MUI dan BPOM.



Selain itu UD. Trikora telah mendapatkan penghargaan oleh Pemerintah Provinsi sebagai Unit Pengolahan Ikan terbaik tahun 2016.



Di bawah ini beberapa contoh produk yang dihasilkan oleh UD. Trikora sebagai berikut:

Di bawah ini sarana prasarana yang dimiliki oleh UD. Trikora sebagai berikut:



Adapun catatan dari sambutan Plt. Dirjen Penguatan Daya saing, Kementerian kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa Unit Pengolahan Ikan (UPI), terlebih skala UMKM adalah merupakan target dari program KKP untuk dapat dikembangkan skala usahanya, dimana UPI Trikora telah mendapatkan Sertifikat Kelayakan Pengolahan/Good Manufacturing Practices (SKP/GMP) karena telah menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Penerbitan SKP/GMP merupakan salah satu pelayanan publik untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam proses perizinan berusaha berbasis resiko bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Peran dari KKP

tentunya akan selalu berkolaborasi dengan Dinas KP provinsi dan kota, serta OPD terkait lainnya seperti Dinas Koperasi dan UKM.

Aspirasi dari UD. Trikora dan Pemerintah Daerah saat kunjungan kerja reses Komisi IV DPR RI antara lain:

1. UD Trikora menginginkan adanya pembinaan dan pendampingan dalam memperoleh sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) agar produk olahan ikannya dapat menembus ekspor.
2. UD Trikora menginginkan adanya bantuan sarana dan prasarana utama dan pendukung, seperti mesin spinner peniris minyak untuk pembuatan abon ikan rowa dan ikan cakalang.
3. UD Trikora berharap mendapatkan bantuan pembiayaan modal untuk meningkatkan fasilitas UPI dan ekspansi variasi produk yang lebih banyak lagi.

Pemerintah Daerah berharap dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat berperan dan memberikan pelayanan izin Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado untuk memudahkan pelaku usaha pengolahan ikan mengurus perizinan.

Pemerintah Daerah berharap dari Pemerintah Pusat dapat memasukan Provinsi Sulawesi Utara masuk dalam Prioritas Nasional di bidang Pengolahan Ikan dan memfasilitasi alat percetakan untuk packaging olahan ikan, mengingat sampai saat ini tempat/wadahnya masih didatangkan dari Pulau Jawa sehingga berdampak pada harga jual produk olahan ikannya.

Tanggapan dari Pemerintah Pusat dan Komisi IV DPR RI saat diskusi dengan UD. Trikora dan Pemerintah Daerah di Kota Manado diantaranya:

1. Pemerintah Pusat, c.q Ditjen Penguatan Daya Saing akan membantu “mesin spinner peniris minyak” untuk pembuatan abon.
2. Pemerintah Pusat, c.q Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan juga akan melakukan pendampingan dan bimbingan kepada UD. Trikora dalam mendapatkan sertifikat Hazard

Analysis and Critical Control Point (HACCP) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Pemerintah Pusat, c.q Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung akan berkoordinasi dan melibatkan UD. Trikora dalam pelatihan dan penyuluhan olahan ikan agar mempunyai varian produk yang lebih banyak lagi.
4. Komisi IV DPR RI akan melibatkan atau mengundang UD. Trikora dalam pameran/bazar yang ada di kantor Jakarta untuk menjual produk olahan ikan dan mengenalkan secara luas ke masyarakat akan pentingnya nilai manfaat hasil perikanan dari Sulawesi Utara.
5. Komisi IV DPR RI akan mengundang UD. Trikora ke Kota Bogor dalam rangka memaparkan dan berbagi pengalaman kepada Pokhlahsar di Kota Bogor guna meningkatkan ilmu pengetahuan, networking dan mengenalkan produk olahan ikan dari Sulawesi Utara.
6. Komisi IV DPR RI mendorong Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan “menjemput bola” pelaku usaha pengolah dan pemasar ke berbagai kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Utara agar Pokhlahsar dapat cepat mengakses perizinan dan meminimalisir biaya/ongkos transport ke Manado.

E. Balai Penelitian Tanaman Palma (Balit Palma)

Balit Palma, adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, yang berada di bawah koordinasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Bogor. Tugas pokok melaksanakan penelitian tanaman kelapa, sawit, sagu, aren, pinang, lontar, gewang, nipah dan kurma. Fungsinya, melaksanakan penelitian di bidang genetika, pemuliaan, perbenihan dan pemanfaatan plasma nutfah, fisiologi, ekologi, entomologi dan fitopatologi tanaman palma. Juga memberikan pelayanan teknik kegiatan penelitian, kerja sama, informasi dan dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman palma.

Melalui eksplorasi dan identifikasi plasma nutfah di berbagai daerah di Indonesia dan mancanegara, telah diperoleh sejumlah aksesori tanaman palma yang dikoleksi di kebun-kebun percobaan Balit Palma. Sebagian telah dimanfaatkan dan dirilis sebagai varietas unggul tanaman palma.

Di antara kelapa unggul yang dirilis, Kelapa Dalam Mapanget dengan potensi produksi tinggi dan kandungan minyak tinggi, merupakan salah satu varietas yang telah menyebar luas di berbagai wilayah Indonesia. Varietas kelapa unggul baru yang sedang dikembangkan yaitu Kelapa Dalam Bido dari Kepulauan Morotai dan kelapa Genjah Entog asal Kebumen yang memiliki sifat cepat berbuah, pertumbuhan tinggi lambat dan ukuran buah besar. Selain kelapa unggul dengan pemanfaatan untuk produksi minyak, santan dan nira, terdapat beberapa varietas kelapa eksotik dengan karakter spesifik dan memiliki nilai jual tinggi yaitu kelapa kopyor, kelapa pandan wangi dan kelapa Cungap Merah. Juga telah dirilis varietas unggul tanaman palma meliputi aren Genjah Kutim dari Kalimantan Timur, Aren Dalam Toumuung dari Kota Tomohon, Aren Dalam Parasi dari Banten dan Aren Smulen ST-1 dari Bengkulu, Pinang Betara dari Jambi dan Pinang Emas dari Kotamobagu. Varietas unggul sagu yang telah dilepas, yaitu Sagu Bestari dan Sagu Selat Panjang Meranti asal Riau dan sagu Baruq di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara.

Sebagian besar inovasi teknologi yang dihasilkan Balit Palma telah dimanfaatkan oleh para *stakeholder*. Fokus penelitian ke depan meliputi percepatan perakitan varietas unggul tipe baru, dilanjutkan dengan perbanyakan massal tanaman palma, menghasilkan teknologi budidaya tanaman palma yang efisien dan berkelanjutan, pengendalian hama dan penyakit terpadu yang ramah lingkungan serta pengolahan produk pangan fungsional, bioenergi dan biomaterial. Beberapa aspirasi yang diterima oleh tim Komisi IV DPR RI adalah, permintaan dukungan peningkatan kapasitas dan jumlah SDM, serta anggaran untuk sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pengembangan dan peningkatan mutu/kualitas tanaman palma nasional, khususnya kelapa. Dalam hal ini,

Komisi IV DPR RI berkomitmen untuk memberikan dukungan selama hasilnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya petani.

Beberapa hal yang disampaikan oleh tim Komisi IV DPR RI diantaranya, terkait luas lahan tanaman kelapa yang semakin lama semakin berkurang. Faktanya, semua produk turunan kelapa di ekspor dan banyak kelapa yang sudah ditebang. Artinya harus ada strategi terkait upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, yang diantaranya melalui kegiatan Gernas Tanam Kelapa. Selain itu, tim Komisi IV DPR RI menyampaikan agar Balit Palma memproduksi dan melakukan perbanyak bibit yang mana sebagian untuk mendukung kebutuhan bibit kelapa Provinsi Sulawesi Utara, dan sebagian lagi berasal dari Direktorat Jenderal Teknis terkait, bisa dengan perbanyak *nursery*. Selain itu mendorong untuk mengembangkan tanaman kelapa yang lebih menguntungkan.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil kunjungan kerja reses Komisi IV DPR RI di Sulawesi Utara maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Bidang Pertanian

1. Komisi IV DPR RI akan bersinergi dengan Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian dalam menyerap aspirasi guna mencari jalan keluar serta merumuskan kebijakan terkait peningkatan produksi pangan nasional.
2. Komisi IV DPR RI meminta seluruh *stakeholder*, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, hingga Satuan Kerja untuk bersinergi dan bekerjasama melakukan penguatan data komoditas pertanian dalam mendukung pembangunan pertanian dan peningkatan ekspor komoditas pertanian.
3. Komisi IV DPR RI sangat mengapresiasi Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado atas terobosannya dengan membangun dashboard digital satu data pertanian Sulawesi Utara yang terlengkap dengan biaya yang relatif rendah.

4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian cq Badan Karantina agar program Mina Esa menjadi contoh/*pilot project* bagi satker lain. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta agar Balai Karantina Kelas I Manado selalu selalu memperbaharui dan melengkapi data terkait pertanian dari hulu hingga hilir.
5. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah baik pusat dan daerah sesuai tugas dan fungsinya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas krisan, serta melakukan akselerasi ekspor tanaman krisan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan penguatan sarana dan prasarana seperti *screenhouse/smart screenhouse*, produksi dan perbanyak bibit melalui pembangunan *nursery*, melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada petani untuk mendapatkan akses KUR, serta melakukan fasilitasi ekspor krisan.
6. Komisi IV DPR RI mendorong adanya subsidi transportasi atas komoditas krisan sehingga mengurangi komponen biaya produksi tanaman krisan.
7. Komisi IV DPR RI meminta PT Pupuk Indonesia untuk mendorong kelompok tani di Tomohon menjadi pengecer/kios pupuk dalam rangka mengatasi kendala akses pupuk, khususnya petani hortikultura.
8. Komisi IV DPR RI menyampaikan agar Balit Palma memproduksi dan melakukan perbanyak bibit yang mana sebagian untuk mendukung kebutuhan bibit kelapa Provinsi Sulawesi Utara, dan sebagian lagi berasal dari Direktorat Jenderal Teknis terkait, bisa dengan perbanyak *nursery*.
9. Komisi IV DPR RI mendorong Balit Palma untuk mengembangkan tanaman kelapa yang lebih menguntungkan.

B. Bidang Kelautan dan Perikanan

1. Komisi IV DPR RI mendukung Kementrian Kelautan dan Perikanan c.q. Ditjen Penguatan Daya Saing dalam menindaklanjuti aspirasi UD.

Trikora dengan membantu “mesin spinner peniris minyak” untuk pembuatan abon.

2. Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan untuk melakukan pendampingan dan bimbingan kepada UD. Trikora agar mendapatkan sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung untuk berkoordinasi dan melibatkan UD. Trikora dalam pelatihan dan penyuluhan olahan ikan agar mempunyai varian produk yang lebih banyak lagi dan berdaya saing.
4. Komisi IV DPR RI mendorong Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan “menjemput bola” pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan ke berbagai kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Utara agar Pokhlahsar dapat cepat mengakses perizinan dan meminimalisir biaya/ongkos transport ke Kota Manado.
5. Komisi IV DPR RI akan melibatkan atau mengundang UD. Trikora dalam pameran/bazar yang ada di kantor Jakarta untuk menjual produk olahan ikan dan mengenalkan secara luas ke masyarakat akan pentingnya nilai manfaat hasil perikanan dari Sulawesi Utara.
6. Komisi IV DPR RI akan mengundang UD. Trikora ke Kota Bogor dalam rangka memaparkan dan berbagi pengalaman kepada Pokhlahsar di Kota Bogor guna meningkatkan ilmu pengetahuan, networking dan mengenalkan produk olahan ikan dari Sulawesi Utara.

C. Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempercepat penyelesaian perizinan atau legalisasi kegiatan atau usaha yang terbangun di dalam kawasan Taman Nasional Bunaken agar tidak merugikan warga masyarakat dan negara serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

2. Komisi IV DPR RI meminta semua pihak termasuk warga, pengelola wisata dan para wisatawan yang datang ke Taman Nasional Bunaken menjaga kelestarian ekosistem terumbu karang.
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membangun Instalasi Pengeolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Pulau Bunaken sebagai upaya mengurangi pencemaran air di sekitar Pulau Bunaken.
4. Komisi IV DPR RI akan melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membahas percepatan penyelesaian usaha atau kegiatan yang terbangun di dalam kawasan hutan khususnya di Taman Nasional Bunaken agar masyarakat dan pemerintah mendapatkan solusi permanen yang saling menguntungkan.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi yang diperoleh dari berbagai pihak, baik dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat bersama mitra kerja Komisi IV DPR RI. Semoga kunjungan kerja tersebut dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, 14 Oktober 2022

Ketua Tim,

Ttd.

Sudin, S.E.

A-151

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN







MEDIA

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41218/t/Masalah+Perizinan+di+Taman+Nasional+Bunaken+Harus+Segera+Diselesaikan>

<http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6845/kunjungi-bunaken-klhk-dpr-ri-hadirkan-solusi-penyelesaian-usaha-terbangun-dalam-kawasan-hutan-tanpa-izin>

<https://www.komentar.co/2022/10/wagub-kandouw-dampingi-komisi-iv-dpr-ri-kunker-di-pulau-bunaken.html>

<https://www.kabaralam.com/konservasi/pr-5935162657/klhk-dan-komisi-iv-dpr-ri-bahas-penyelesaian-usaha-tanpa-izin-di-kawasan-tn-bunaken>

<https://manado.tribunnews.com/2022/10/10/richard-sualang-dampingi-steven-kandouw-terima-kunker-komisi-iv-dpr-ri-ke-bunaken-sulawesi-utara>

<https://www.sulutreview.com/2022/10/11/kandouw-dan-komisi-iv-dpr-ri-legalisasi-usaha-di-kawasan-konservasi-bunaken/>

<https://www.pilarsulut.com/2022/10/wagub-kandouw-dampingi-komisi-iv-dpr-ri-sambangi-pulau-bunaken/>

<https://suarasulut.com/2022/10/11/wagub-kandouw-dan-komisi-iv-dpr-ri-datangi-bunaken-simak-ini-tujuannya/>

<https://www.katabrita.com/tomohon/walikota-tomohon-terima-kunker-komisi-iv-dpr-ri/>

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41198/t/Komisi+IV+Apresiasi+Sistem+Kerja+Unit+Pengolahan+lkan+di+Manado>

<https://cakrawala.web.id/tomohon-diharapkan-ekspor-krisan-ke-ln-target-terdekat-singapura-dan-jepang-200-000-tangkai-per-bulan/>

<https://kkp.go.id/djprl/bpsplmakassar/artikel/45971-kegiatan-pendampingan-kunjungan-kerja-komisi-iv-dpr-ri>

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41198/t/Komisi+IV+Apresiasi+Sistem+Kerja+Unit+Pengolahan+lkan+di+Manado>

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/10/11/ingin-perluas-jangkauan-pasar-umkm-produk-perikanan-sulut-minta-bantuan-dpr>

<https://headtopics.com/id/ingin-perluas-jangkauan-pasar-umkm-produk-perikanan-sulut-minta-bantuan-dpr-30602621>